

ABSTRAK

SAHRUDAN, NPM : 2022327, Judul “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN DI DESA TELUK MESJID, KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA”. Di bawah bimbingan Bapak **Drs. H. Arpandi, M.AP.** selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak **Djayeng Turano Gunade, S.Sos., M.AP.** selaku Dosen Pembimbing II.

Implementasi kebijakan sanitasi melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Gerakan STOP BABS di Desa Teluk Mesjid belum berjalan optimal. Masih ditemukan praktik buang air besar sembarangan, rendahnya sosialisasi, keterbatasan anggaran dan sarana jamban sehat, serta belum diterapkannya sanksi dan SOP secara konsisten. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 16 orang yang terdiri dari aparatur desa, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis implementasi kebijakan menggunakan indikator teori George C. Edwards III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan perpanjangan waktu pengamatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Gerakan STOP BABS di Desa Teluk Mesjid belum berjalan secara optimal. Pada aspek komunikasi, sosialisasi kebijakan belum dilakukan secara merata sehingga pemahaman masyarakat masih rendah. Pada aspek sumber daya, sumber daya manusia dinilai cukup mendukung, namun keterbatasan anggaran dan sarana jamban sehat masih menjadi kendala utama. Pada aspek disposisi, pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen yang cukup baik, tetapi belum disertai dengan ketegasan dalam penerapan aturan dan sanksi. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi, pelaksanaan kebijakan belum didukung oleh penerapan SOP secara konsisten. Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan STOP BABS terdiri atas faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor penghambat adalah terbatasnya sosialisasi, keterbatasan anggaran dan sarana sanitasi, belum diterapkannya sanksi secara tegas, serta belum adanya SOP yang jelas dan konsisten, sedangkan faktor pendukung adalah adanya komitmen aparatur desa dan tenaga kesehatan, ketersediaan sumber daya manusia yang cukup, serta kerja sama antar pihak terkait.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar pemerintah desa dan pemerintah daerah meningkatkan sosialisasi kebijakan secara berkelanjutan, menambah dukungan anggaran dan sarana prasarana jamban sehat, meningkatkan ketegasan pelaksana kebijakan dalam penerapan sanksi, serta menerapkan SOP secara konsisten agar tujuan kebijakan STOP BABS dapat tercapai secara optimal.